

BAB II

FILM DOKUMENTER “INI SCENE KAMI JUGA!”

A. Perkembangan Film Dokumenter di Indonesia

Film dokumenter di Indonesia pada awalnya digunakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda sebagai alat untuk mendukung kepentingan politik kolonial. Produksi film dokumenter oleh pemerintah kolonial dimaksudkan untuk menggambarkan bangsa Eropa “sesungguhnya” versi pemerintah kolonial (Junaedi dan Arifianto, 2016: 76).

Kemudian pada saat Jepang menduduki Indonesia, film dokumenter dialihfungsikan menjadi alat propaganda. Nugroho dan Herlina (2013: 60) menjelaskan bahwa penguasa Jepang juga memutar film-film propaganda serta film fiksi berkualitas bagus, saat itu perfilman Jepang sangat menonjol di Asia. Dengan menggunakan film dokumenter, Jepang mencoba mengambil hati bangsa Indonesia dengan memosisikan diri sebagai saudara tua bagi Indonesia, serta menegaskan bahwa bangsa Eropa merupakan musuh Jepang. Tentu saja hal ini dimaksudkan agar Jepang dapat dengan mudah menanamkan ideologi etnonasionalisme-nya kepada bangsa Indonesia. Berita kemenangan Jepang di Perang Pasifik menjadi menu film dokumenter, yang sebenarnya lebih layak disebut film propaganda (Junaedi dan Arifianto, 2016: 76-77).

Ketika Indonesia merdeka, fungsi dari film dokumenter tidak mengalami perubahan, layaknya perpanjangan tangan dari pemerintahan Belanda dan Jepang sebelumnya. Menurut Junaedi dan Arifianto (2016: 77) Film dokumenter yang diproduksi dengan durasi pendek umumnya berisi propaganda pemerintah, pemerintahan Soekarno dengan dogma “politik adalah panglima” yang menekankan produksi film yang berisi propaganda politik, sedangkan pemerintahan Orde Baru yang menjadikan “ekonomi sebagai panglima” mengisi film dokumenter dengan propaganda pembangunan.

Setelah runtuhnya rezim Soeharto dan pemerintahan Orde Baru pada bulan Mei 1998, industri perfilman di Indonesia seperti mendapatkan angin perubahan ke arah yang lebih baik. Film-film yang diproduksi sineas muda Indonesia akhirnya memperoleh ruang ekspresi dan memberikan alternatif tontonan yang ‘baru’ bagi masyarakat (Putri, 2013: 124).

Perfilman di Indonesia (termasuk film dokumenter) mulai berkembang, ditandai dengan mulai bermunculannya komunitas-komunitas film di berbagai daerah. Nugroho dan Herlina (2013: 361-362) menjelaskan bahwa motor penggerak utama kebangkitan sinema Indonesia adalah komunitas film. Di tengah ketidakstabilan politik pasca kejatuhan Orde Baru yang menyebabkan ketidakstabilan produksi film, muncul berbagai komunitas film di berbagai daerah yang menjadi ruang kreatif baru dan mendorong kelahiran pembuatan film, diskusi, pemutaran dan festival. Inilah demokratisasi film yang didorong oleh euforia kebebasan berpendapat

dan difasilitasi oleh teknologi digital yang relatif mudah dioperasikan dengan biaya murah.

Selain itu, perkembangan dan kebangkitan film dokumenter juga ditandai dengan mulai diselenggarakannya festival-festival film di Indonesia. Perkataan festival berasal dari bahasa Latin *festivus* yang berarti perayaan, pesta, dan upacara kegembiraan (Amura, 1989: 40). Salah satu festival film dokumenter yang pernah dan masih diselenggarakan adalah Festival Film Dokumenter (FFD) di Yogyakarta, yang menurut Putri (2013: 126) adalah festival film pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang khusus menangani film dokumenter. Selain Festival Film Dokumenter (Yogyakarta), terdapat pula festival film sejenis seperti Jogja-Netpac Asian Film Festival (Yogyakarta), Festival Film Pelajar Jogjakarta (Yogyakarta), Konfiden (Jakarta), Festival Film Purbalingga (Banyumas), hingga Queer Film Festival (Jakarta) yang konsisten diselenggarakan setiap tahun. Nugroho dan Herlina (2013: 364) menjelaskan lebih lanjut bahwa perkembangan komunitas tidak sebatas dalam fungsi diskusi dan pemutaran, namun menumbuhkan pula beragam perspektif, sebetulnya komunitas kajian seperti Rumah Sinema (Yogyakarta), Forum Lenteng (Jakarta), dan Rumah Film (Jakarta), menyusul kemudian Kinoki dan Montase (Yogyakarta).

Perkembangan film juga dapat dilihat dari banyaknya pembuat film atau *film maker* serta banyaknya karya film yang diikutsertakan pada sebuah kompetisi atau festival. Hingga tahun 2012 tercatat lebih dari 300 pembuat film dari seluruh

Indonesia dan sampai dengan tahun 2013 terdapat 737 film yang mengikuti kompetisi Festival Film Dokumenter (Dahlan dalam Aryanto, 2015: 52).

Festival Film diyakini sebagai tonggak bangkitnya industri perfilman nasional, khususnya dokumenter. Karena dalam festival film akan ada pertemuan antara pembuat film atau *film maker*, penonton, pengamat film, pihak sponsor, serta pelaku-pelaku atau penggiat-penggiat film lainnya dalam satu wadah, yang mana hal tersebut akan meningkatkan kualitas industri perfilman nasional dengan membuka ruang-ruang alternatif di samping ruang-ruang *mainstream* atau arus utama.

B. Gerakan Perempuan di Indonesia

Gerakan perempuan di Indonesia diprakarsai oleh seorang perempuan asal Jepara pada abad ke-19, perempuan itu bernama Raden Ajeng Kartini. Watkins dan Rueda (2007: 79) menjelaskan bahwa Raden Ajeng Kartini (1879-1904) merupakan anak dari seorang pejabat tinggi yang menentang poligini, perkawinan paksa dan penjajahan, dan menyerukan hak perempuan atas pendidikan. Kartini mendirikan sebuah sekolah untuk gadis-gadis dengan 120 orang muridnya, namun dia meninggal secara tragis saat melahirkan anak pada usia 25 tahun.

Model perjuangan Kartini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari segi karakter dan jenisnya bila dibandingkan dengan model perjuangan melawan penjajahan dan penindasan pada umumnya di masa itu, jika umumnya digunakan senjata untuk melawan dan berjuang melawan penjajah, Kartini justru menggunakan tulisan sebagai alat perjuangan. Menurut Toer (2003: 113) justru dengan tulisannya

tersebut, sekalipun cuma menggarap bidang kepangrehprajaan, bidang kesatria, tanpa disadarinya Kartini sebenarnya telah menduduki tempat sebagai Brahmana, sebagai pemikir, sebagai konseptor. Dalam pada itu, Kartini menekankan pada sektor pendidikan sebagai metode perjuangannya. Hafidz (1993: 94-95) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan satu pendekatan yang tepat, karena pendidikan merupakan salah satu faktor yang dengan nyata mengubah sistem nilai dalam masyarakat, selain menawarkan berbagai kesempatan bagi perempuan untuk mengemansipasikan dan mengaktualisasikan diri. Hafidz (1993: 95) menjelaskan lebih lanjut bahwa langkah Kartini yang strategis, sebagaimana kita lihat, telah menumbuhkan sejumlah perempuan terpelajar yang kemudian membentuk organisasi-organisasi moderen. Pada dasarnya, pola berfikir dan metode perjuangan Kartini jauh melampaui usia, zaman, serta keadaanya pada saat itu, sehingga menjadi pemantik bagi masyarakat Indonesia untuk terus berjuang melawan penindasan.

Perjuangan Raden Ajeng Kartini tersebut kemudian berlanjut pada perjuangan gerakan kaum perempuan Indonesia pada era selanjutnya. Hal tersebut dibuktikan dengan mulai bermunculannya organisasi atau perkumpulan perempuan seperti Puteri Mardiko, Aisyiyah, Puteri Indonesia, Jong Islaminten Bond, Gerwani, dan lainnya. Apabila ditilik dari sejarahnya, organisasi perempuan dapat dipetakan dalam empat babak yaitu masa pra-kemerdekaan, masa pemerintahan Soekarno, masa pemerintahan Soeharto atau era Orde Baru, dan masa reformasi hingga saat ini.

Pada masa pra-kemerdekaan, lahirlah organisasi perempuan pertama di Indonesia yang terbentuk atas bantuan Boedi Oetomo, organisasi tersebut bernama Poetri Mardika. Menurut Suryochondro dalam Darwin (2004: 285) Poetri Mardika dan gerakan perempuan di Indonesia memang tidak bisa dipisahkan dari gerakan nasional bahkan internasional yang memperjuangkan emansipasi, nasionalisme, dan kebebasan dari kolonialisme. Setelah itu muncullah berbagai organisasi perempuan yang merupakan bagian dari organisasi atau gerakan nasional seperti Jong Java Meiskering, Young Javanese Girls Circle, Aisyiyah, Puteri Indonesia, Jong Islaminten Bond, Poetri Boedi Sedjati, Serikat Kaoem Iboe Soematera, dan lain sebagainya.

Selanjutnya masa pemerintahan Soekarno, pada masa ini dapat dikatakan bahwa perjuangan pada masa kemerdekaan akan lebih sulit bila dibandingkan dengan masa sebelum kemerdekaan atau masa penjajahan. Suryochondro (1984: 135) menjelaskan bahwa dalam periode yang merupakan masa perang kemerdekaan melawan penjajah kembali ini, organisasi-organisasi perempuan timbul sesuai dengan tuntutan zaman, yaitu yang mempunyai tujuan ikut serta dalam usaha membela dan menegakkan kemerdekaan negara. Secara garis besar, apa yang diperjuangkan perempuan pada era setelah kemerdekaan adalah kesamaan politik, hak memperoleh pendidikan dan kesempatan bekerja. Perjuangan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi perempuan saat itu harus berhadapan dengan diskriminasi atau pembagian peran yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan (Darwin, 2004: 287). Pada era

ini, lahir beberapa organisasi perempuan seperti Perwani, Gerwani, Pemuda Puteri, Budi Isteri, dan lain sebagainya.

Kemudian masa pemerintahan Soeharto atau masa Orde Baru, negara Orde Baru menurut Wieringa (2010: 33) membangun identitas nasionalnya setelah berhasil menindas ideologi asing komunis yang dituduh sebagai penyebab kekacauan dan moral seksual rendah perempuan. Kampanye mereka didasarkan pada metafora-metafora seksual, ketakutan kastrasi atau pengebirian laki-laki yang menggambarkan peran Gerwani (yang dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia) dalam bentuk mengerikan dan menjijikkan yang seolah-olah terjadi dalam kudeta. Selain itu, masa pemerintahan Soeharto juga menjadi era dimulainya subordinasi bagi kaum perempuan dan superioritas bagi kaum laki-laki. Darwin (2004: 290) menjelaskan bahwa reproduksi nilai subordinasi ini secara menonjol terlihat dari berdirinya Organisasi-Organisasi Isteri, baik isteri pegawai negeri (Dharma Wanita), isteri militer (Persit Kartika Candra Kirana), isteri profesional (Persatuan Isteri Dokter Indonesia, Persatuan Isteri Insinyur Indonesia). Organisasi tersebut menegaskan posisi perempuan sebagai pendamping (*konco wingking*) laki-laki, yang meletakkan eksistensi, status dan kehormatan perempuan pada bayang-bayang identitas suami, bukan identitas perempuan itu sendiri.

Era Soeharto ini juga merupakan era kooptasi organisasi masyarakat, tidak terkecuali organisasi perempuan. Ditambah dengan diberlakukannya sistem politik wadah tunggal menyebabkan kemandirian dari organisasi masyarakat menjadi hilang.

Kooptasi dan penyatuan organisasi-organisasi perempuan dalam satu wadah tunggal ini dianggap sebagai pembrangusan sekaligus penghancuran ide dan bertentangan dengan asas demokrasi. Jadi, organisasi perempuan di Indonesia mengalami proses domestikasi dengan implikasi terjadinya penjinakan, segregasi, dan depolitisasi (Wulan, 2008: 122). Berangkat dari kenyataan ini, Darwin (2004: 291) menjelaskan bahwa muncul berbagai LSM yang diharapkan sebagai penerus gerakan perempuan dengan warna yang berbeda seperti Yayasan Annisa Swasti yang peduli terhadap buruh perempuan (1982), Kalyanamitra yang bergerak di bidang dokumentasi (1985), Yayasan Perempuan Mahardika (1986), Yayasan Solidaritas Perempuan (yang sekarang menjadi Pereserikatan Solidaritas Perempuan) (1990) yang bergerak di bidang buruh migran dan sebagainya.

Terakhir pada masa reformasi hingga saat ini, era ini ditandai dengan kekacauan dalam banyak hal seperti korupsi, konflik suku dan agama, otonomi daerah yang amburadul, dan situasi ekonomi yang semakin terpuruk. Dalam situasi yang kacau seperti ini, masalah perempuan semakin terlupakan. Era ini juga ditandai dengan dikeluarkannya Inpres No. 9 Tahun 2000. Darwin (2004: 292) menjelaskan bahwa Inpres ini dapat dikatakan sebagai produk yang monumental dari perjuangan perempuan, karena dalam Inpres ini ditekankan tentang keharusan bagi setiap instansi pemerintah, di pusat dan daerah untuk melakukan pengarusutamaan gender. Dalam era reformasi, Djoeffan (2001: 290) menjelaskan bahwa munculnya berbagai organisasi perempuan yang membangkitkan kembali para reformis perempuan seperti

tahun 1930-an yang tidak saja membela kaumnya sendiri, melainkan juga membela dan memikirkan nasib masyarakat marjinal, berbagai organisasi LSM yang membela rakyat kecil antara lain Wardah Hafiz, kelompok perempuan yang menamakan Suara Ibu Peduli yang membela hak anak, Ratna Sarumpaet yang memperjuangkan demokrasi dan hak buruh perempuan lewat organisasi teaternya, Nursyahbani Kacasungkana yang membela perempuan dari obyek kekerasan dan kejahatan melalui supremasi hukum, tidak ketinggalan Ibu Aisyah Amini yang telah berkiprah dalam dunia politik sejak lama, serta masih banyak lagi tokoh perempuan lainnya yang berkiprah dalam organisasi perempuan. Pada era ini, Darwin (2004: 293) menjelaskan lebih lanjut bahwa ada banyak LSM perempuan yang sangat produktif memperjuangkan perempuan, tetapi mereka tidak punya massa, dan juga terbatas aksesnya untuk mempengaruhi kebijakan publik.

Wulan (2008: 125) menjelaskan lebih lanjut bahwa jika dilihat dari ketiga fase perkembangan gerakan perempuan (prakemerdekaan; Orde Lama, awal Orde Baru, serta pasca 1980-an) terungkap bahwa Orde Baru merupakan masa pengebirian atau domestikasi gerakan perempuan. Gerakan perempuan terkooptasi pemerintah Orde Baru, dan memasuki periode “tidak ada perlawanan” terhadap diskriminasi dan eksploitasi yang dialami kaum perempuan Indonesia. Pada fase setelah 1980-an, gerakan perempuan mengalami keragaman dalam visi-misi. Seiring dengan arus globalisasi, gerakan perempuan muncul dari berbagai kepentingan, seperti kelompok kultural, agama, bahkan dalam formasi Organisasi Tanpa Bentuk (OTB). Gerakan

perempuan pasca reformasi ini berjuang sendiri-sendiri untuk membantu kaum perempuan yang nasibnya tertindas.

C. Pembahasan Tentang Film Dokumenter “Ini Scene Kami Juga!”

C.1. Sinopsis Film Dokumenter “Ini Scene Kami Juga!”

Film “Ini Scene Kami Juga!” merupakan film dokumenter karya Hera Mary yang menceritakan tentang gerakan kaum perempuan dalam *scene hardcore/punk* di Indonesia. Film ini melibatkan 14 narasumber perempuan yang terdiri dari personil band, penulis *zine*, desainer, serta fotografer dengan maksud mengajak para perempuan yang terlibat dalam *scene hardcore/punk* di Indonesia untuk lebih berani memberikan sesuatu untuk komunitasnya masing-masing, serta untuk menegaskan bahwa *scene* ini bukan hanya untuk kaum laki-laki.

Film ini menceritakan secara runtut bagaimana para perempuan pada awalnya tertarik untuk terlibat dalam *scene hard core/punk*, bagaimana realitas yang terjadi terhadap perempuan dalam komunitas ini, hal-hal yang disukai dan dibenci dalam komunitas ini, serta pesan kepada seluruh perempuan di dalam maupun di luar komunitas.

Beberapa narasumber dalam film ini menceritakan bagaimana mereka awalnya tertarik dan akhirnya memutuskan untuk terlibat langsung dalam komunitas ini. Berawal dari mendapatkan *zine* dan mendengarkan beberapa rekaman lagu bergenre *hardcore/punk*, kemudian pergi mendatangi *gigs hardcore/punk*, para perempuan ini pada akhirnya menemukan suatu aliran alternatif yang lebih cocok

dengan kehidupan mereka. Kemudian, setelah memutuskan terlibat, para perempuan ini mulai menemukan suatu paham, semangat, ideologi, serta literatur baru yang tidak ditemukan pada aliran arus *mainstream*, seperti kebebasan yang bertanggung jawab, *food not bombs*, anarkisme, semangat kerja kolektif, dan memproduksi suatu karya secara DIY (Do It Yourself).

Para narasumber kemudian menceritakan pengalaman menjadi perempuan yang terlibat dalam *scene hardcore/punk*. Secara garis besar, permasalahan yang kerap terjadi adalah pelecehan seksual yang dilakukan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan yang jumlahnya sangat sedikit dalam komunitas ini. Dominasi laki-laki yang disadari sangat bertentangan dengan semangat punk sendiri, yaitu *equality*, membuat para perempuan sedikit demi sedikit mulai menunjukkan taji. Dimulai dengan berani merebut ruang, lalu menunjukkan karya yang mereka ciptakan, kemudian menegaskan bahwa perempuan dalam komunitas ini bukanlah objek, melainkan aktor yang punya andil dan kontribusi agar komunitas ini bisa terus hidup dan produktif.

Kemarahan dan sifat kritis para narasumber pada dasarnya berakar dari pemahaman dan implementasi para *punk-rockers* laki-laki yang keliru dalam memahami semangat punk. Dalam punk terdapat semangat-semangat seperti kesetaraan atau *equality*, *anti-sexism*, *anti-racism*, *anti-facism*, dan DIY (Do It Yourself). Namun pada kenyataannya, semangat-semangat yang menjadi akar dari punk tersebut menjadi terkesan delusional, karena para laki-laki justru cenderung

berperilaku sebaliknya. Para perempuan hendak menghancurkan sebuah hegemoni yang masih diimplementasikan oleh kaum laki-laki hingga saat ini, baik secara paham maupun perilaku yang cenderung keliru.

Di luar dari kemarahan dan sifat kritis para narasumber, mereka pada akhirnya tetap berada di dalam komunitas ini. Beberapa faktor yang mendasari hal tersebut diantaranya independensi, semangat, solidaritas pertemanan, menemukan kepuasan dalam *moshpit*, serta menemukan alternatif berkehidupan yang paling cocok dengan mereka. Mereka sadar, bahwa komunitas ini sangat kecil dan jarang sekali terpublikasikan, namun jaringan dari komunitas *hardcore/punk* sangat luas, dan hampir ada di seluruh penjuru dunia.

Pada akhir cerita, tidak lupa para narasumber memberi pesan bagi para perempuan, baik di dalam maupun di luar komunitas *hardcore/punk*. Mereka menyarankan agar para perempuan selalu membuka pikiran dan jangan pernah takut untuk mencari tahu serta merebut ruang. Mereka juga berpesan agar dalam memutuskan segala sesuatu, pastikan keputusan tersebut merupakan suatu hal yang dapat dipertanggung jawabkan, dan bukan suatu upaya pelarian.

C.2. Profil Sutradara Film Dokumenter “Ini Scene Kami Juga!”

Hera Maryani atau lebih dikenal dengan panggilan Hera Sin tinggal di Bandung sejak umur 9 tahun. Mulai aktif datang ke *show punk* dan terlibat didalamnya sejak umur 18 tahun. Beberapa kali bergabung dengan beberapa band seperti D'ponis, Kroia dan band beraliran *sludge-crust-core* bernama Oath. Hera juga

seorang yang gemar mendokumentasikan live band atau kegiatan suatu kolektif melalui video. Dia juga salah satu perempuan yang dikenal aktif bersama WOO!! Kolektif dan Kolektif Betina. Dia penulis di salah satu blog yang khusus meliput kegiatan perempuan di skena *hardcore/punk*. Adapun film dokumenter yang dibuat oleh Hera Mary adalah sebagai berikut.

Sutradara

2018 - Ini Scene Kami Juga! #2

2016 - Ini Scene Kami Juga!

C.3. Struktur Dalam Film Dokumenter “Ini Scene Kami Juga!”

Sutradara : Hera Mary

Editor : Geboy AhoAho

Penerjemah : Kartika Jahja

Kameramen : Hera Sin (Hera Mary)

Arif Susilo

Ichanoski

Hendrick Ben

Schizoid Fajar

Aji Komo

Pramilla Deva

Didit

Gaplek

Kontributor : Aldiman Sinaga
Bayu Adhitya
Gita Ayu Gurumilang
The Dollys Togos
Aldi Ferdiana
FNB Depok
Ruth Elizabeth
Arnie Lia
Ikbal Arifin Suradi
Dinda Advena
Ika Vantiani
Dinnah
Ajenk Resita
Alda
Fransisca Ayu
Schenichen
Pramilla Deva
Needle 'N Bitch
Mitha
Rahma
Otex

Anggi Faradilla

Narasumber : Ika Vantiani – Peniti Pink Info House

Ina – Atret

Sheni – Kontaminasi Kapitalis

Ajeng Resista – Bunpai Suru Zine, Almost Brother

Nurul – Grrls Baricade, Dead Alley

Dinda Advena – Fotografer

Fransisca Ayu – Leftyfish

Otex – Dynamite

Dinnah – Take One Step

Mita - Needle ‘N Bitch, InstitutA

Pramilla Deva – Pussy Wagon Zine

Rahma – Fat In Diet

Alda – Negasi, Lust Slash Desire Zine

Anggi Faradilla – Wicked Flesh

Original Sound

Track : Kroia – Nature Of

Dead Alley – Lawan

Talking Coasty – Please Stop Pretending

Atret – Berontak

Oath – Saksi Bisu Kesakitan

Talking Coasty – Stuck On My Room

Leftyfish – Tress

Delta Force – Penuh Semangat

Kontaminasi Kapitalis – Hak Perempuan

Leftyfish – Mosquito

Die Fast – Musisi Jadi Nabi

Fat In Diet – My Guilt

No Remain – Resistance

Wreck – The Pandemonium Organ

Milisi Kecoa – Kota Masa Depan

Confess – The Gate of Drain Nation

Rumah Produksi : Hungry Heart Project

Waktu Tayang : 13 Mei 2016

Durasi : 67 menit 53 detik

Negara : Indonesia

Bahasa : Indonesia